

Kebijakan Keberlanjutan 2022

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower,
Lantai 25-27
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta, 12710
Email: mitratel@mitratel.co.id



SANGGAHAN

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk., merupakan perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara. Misi kami adalah untuk mendukung pelanggan kami sebagai mitra strategis dengan memanfaatkan kemampuan digital baru untuk memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan dan menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa.

Kami sepenuhnya menyadari pentingnya keberlanjutan dalam mengembangkan dan memperkuat misi Perusahaan. Kami berkomitmen untuk memahami dan mengimplementasikan praktik-praktik keberlanjutan untuk mencapai keseimbangan dalam mencapai strategi bisnis perusahaan, tujuan para Pemegang Saham, dan memenuhi tanggung jawab etis kami terhadap Pemangku Kepentingan lainnya dan masyarakat secara luas.

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Keberlanjutan” yang berlaku untuk PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan anak perusahaannya, selanjutnya disebut “Mitratel” atau “Perusahaan”. Kebijakan Keberlanjutan merupakan bentuk komitmen Mitratel dalam mengelola aspek keberlanjutan, khususnya pada sektor infrastruktur telekomunikasi, serta untuk turut berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Mitratel dalam merespon isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dan signifikan secara bertanggung jawab sesuai dengan konteks keberlanjutan Mitratel.

Dalam mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan, Mitratel akan melibatkan dan bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk mitra kerja dan pihak ketiga lainnya untuk membangun aspek sosial dan ekonomi, serta bersama-sama memitigasi dan mengatasi tantangan untuk pencapaian tujuan keberlanjutan. Penerapan Kebijakan Keberlanjutan bersifat progresif dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta sumber daya yang ada. Mitratel juga mengakui adanya tantangan dan hambatan dalam menerapkan Kebijakan Keberlanjutan. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa belum tentu semua isi dari Kebijakan Keberlanjutan ini dapat dipenuhi sepenuhnya dengan segera. Mitratel berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara bertahap, efektif, dan efisien guna memenuhi ketentuan Kebijakan Keberlanjutan.

Kontak Mitratel

Kontak terkait informasi mengenai Kebijakan Keberlanjutan:

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower,
Lantai 25-27, 50
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta, 12710
Email: investor.relations@mitratel.co.id

A. Pengantar

Mitratel bergerak di bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya, termasuk jasa penunjang digital untuk *mobile infrastructure*, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Mitratel. Pendirian Perusahaan ditujukan untuk merespon pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya telekomunikasi seluler dengan menjalankan bisnis penyediaan menara telekomunikasi. Mitratel memiliki 2 portofolio utama: *Tower Leasing (Built to Suit, colocation dan Reseller)* dan *Tower Related Business (Project Solution, dan managed service)*.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap implementasi inisiatif keberlanjutan, Mitratel merumuskan Kebijakan Keberlanjutan sebagai acuan untuk mempromosikan dan menerapkan inisiatif keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagaimana tujuan para Pemegang Saham. Penyusunan kebijakan ini melibatkan manajemen dan berbagai fungsi di internal Mitratel serta dipandu oleh tenaga ahli keberlanjutan yang independen. Kebijakan keberlanjutan dalam perumusannya memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berlaku.

Ruang lingkup Kebijakan Keberlanjutan ini berlaku untuk PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan anak perusahaannya. Kebijakan ini juga mengikat pada seluruh wilayah operasional Perusahaan dan rantai pasok Mitratel.

Pelaksanaan Kebijakan Keberlanjutan dijalankan secara menyeluruh dan kolektif oleh berbagai unit, fungsi, dan departemen yang ada dengan dipimpin dan diawasi langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris Mitratel. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan memahami Kebijakan Keberlanjutan ini dengan baik, pembaca perlu mengetahui aspek bisnis dan konteks keberlanjutan Mitratel. Jika diperlukan, pembaca dapat menghubungi Mitratel melalui kontak yang tercantum dalam dokumen ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau untuk memberikan rekomendasi.

B. Konteks Keberlanjutan Mitratel

Dalam konteks *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), kesejahteraan masyarakat dan kesehatan yang baik merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai Pemerintah. SDGs sendiri telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan adanya landasan hukum tersebut, berbagai pihak, termasuk juga sektor usaha, didorong untuk mendukung Pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Mitratel senantiasa memberikan dukungan terhadap TPB melalui kegiatan-kegiatan usaha yang bertanggung jawab sosial (*socially responsible business conduct*) dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang dijalankan terhadap masyarakat.

Mitratel akan berusaha mempromosikan aspek LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) untuk masa depan yang berkelanjutan. Hal ini tercantum dalam *Environmental, Social and Governance (ESG) Direction* Mitratel yang tertuang pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2022-2026. *ESG Direction* ini mencakup lima aspek antara lain:

1. *Right Approach*, yaitu dengan menetapkan *framework* LST yang sesuai bagi Mitratel untuk memprioritaskan fokus area keberlanjutan seperti GRI, SASB, POJK 51 2017, dll
2. *Right Goal Setting*, yaitu dengan mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), memastikan keseimbangan antara *cost and sustainability value add*, dan memastikan untuk menghasilkan keuntungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan
3. *Right Communication*, yaitu secara aktif berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, mengkomunikasikan dan menginformasikan inisiatif LST melalui laman website CSR Mitratel, dan mempublikasikan laporan keberlanjutan secara berkala sesuai dengan pedoman *framework* LST.
4. *Right Governance*, meninjau dan meningkatkan kualitas prosedur secara berkala dan membentuk tim ESG yang bertugas untuk mengawasi dan mendorong inisiatif LST serta melaporkannya secara rutin kepada Direksi.

Dalam aktivitas operasionalnya, Mitratel telah menerapkan beberapa upaya sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan LST, seperti mengurangi jumlah *site* yang menggunakan catuan diesel, mendata dan memantau emisi cakupan 1 dan 2, membangun *site* tipe *shelterless*, menggunakan *Solar Panel System* (SPS), melaksanakan pengelolaan limbah 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*), mengimplentasikan Sistem Manajemen Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menerapkan remunerasi sesuai regulasi yang berlaku. Saat ini juga, Mitratel telah memiliki Pedoman Pengelolaan *Good Corporate Governance*, melakukan manajemen risiko perusahaan, termasuk pengelolaan keamanan data dan informasi yang mempertimbangkan aspek strategi, operasional, keuangan, dan kepatuhan.

Dalam usaha pengembangan dan penguatan aspek LST Perusahaan, Mitratel berencana untuk melakukan penguatan tujuan dan target ESG perusahaan, mengembangkan ESG inisiatif untuk dapat mendorong pencapaian ESG Perusahaan, serta melakukan penguatan pengelolaan dan komunikasi ESG Perusahaan di dalam internal Perusahaan maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Adapun, penguatan aspek LST akan dilakukan dalam aspek ketenagakerjaan, pengembangan komunitas sekitar operasional, penguatan sistem tata kelola, seperti keamanan dan privasi data Perusahaan, *Whistleblowing System* (WBS), dan pengelolaan risiko dan mitigasi Perusahaan. Selain itu, perusahaan juga berencana untuk melakukan pengembangan teknologi dan peningkatan aset untuk mendukung aspek LST Perusahaan, serta meningkatkan komunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan inisiatif – inisiatif LST.

C. Rujukan

Dalam menyusun Kebijakan Keberlanjutan, Mitratel memperhatikan beberapa referensi berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pegelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
8. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
 - a. Nomor 18 Tahun 2009;
 - b. Nomor: 07/Prt/M/2009;
 - c. Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009;
 - d. Nomor: 3 /P/2009
13. Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
15. Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia
16. ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*
17. *International Finance Corporation Performance Standards*
18. *Global Reporting Initiatives Standards*
19. *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*
20. *AA1000 Accountability*

21. Panduan dan peraturan lainnya terkait aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berlaku di Indonesia.

D. Pemangku Kepentingan

Salah satu misi Mitratel yakni menciptakan *value* bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pemangku kepentingan mempengaruhi Mitratel dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Dengan posisi yang demikian penting, maka Mitratel berupaya untuk membangun kerja sama dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan kunci yang diantaranya:

1. Regulator termasuk di antaranya yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Pemerintah Daerah, dan lain-lain.
2. Para Pemegang Saham
3. Pelanggan/*Tenant/Customer* dalam hal ini individu, organisasi, atau institusi yang menggunakan jasa Mitratel
4. Karyawan
5. Mitra Kerja
 - a. Pemasok, dalam hal ini organisasi/institusi yang menyediakan barang dan jasa untuk Mitratel, termasuk juga fasilitasi bagi perusahaan,
 - b. Distributor meliputi para rekanan bisnis.
6. Masyarakat dalam hal ini individu atau kelompok yang berada di sekitar perusahaan dan/atau masyarakat yang menerima manfaat dari perusahaan melalui berbagai kegiatan atau inisiatif lainnya.
7. Rekanan Media

Seluruh pemangku kepentingan tersebut menjadi pihak - pihak yang harus diperhatikan oleh Mitratel. Mitratel juga berupaya untuk membina hubungan dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan tersebut melalui berbagai program yang telah dirancang Perusahaan, baik yang bersifat terencana maupun insidental.

E. Isu Keberlanjutan

1. Energi
Sektor bisnis perusahaan yang terkait dengan aspek Telekomunikasi mengkonsumsi energi dalam jumlah yang cukup besar. Namun hal tersebut, tergantung pada sumber energi, efisiensi pembangkit, dan jumlah konsumsi listrik oleh infrastrukturnya. Jumlah konsumsi energi akan memberikan dampak lingkungan seperti pelepasan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke udara, sehingga berdampak pada risiko keberlanjutan Perusahaan. Tingginya isu global akan perubahan iklim, juga menjadikan isu pengelolaan energi dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi salah satu fokus inisiatif nasional maupun global. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola efisiensi atau intensitas energi yang digunakan, serta mulai menerapkan sumber energi alternatif sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab Perusahaan dan mendukung inisiatif global.
2. Emisi
Salah satu dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional adalah emisi GRK dan konvensional ke atmosfer. Dampak lingkungan tersebut berdasarkan peraturan pemerintah terkait lingkungan wajib untuk dilakukan pengelolaan. Adanya target Pemerintah Indonesia dalam pengurangan jumlah emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 juga menjadikan isu pengelolaan emisi menjadi material LST yang signifikan untuk dikelola.
3. Limbah
Sektor telekomunikasi biasanya tidak menggunakan bahan berbahaya ataupun menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Namun, pengoperasian beberapa jenis peralatan *switching* dan transmisi mungkin memerlukan penggunaan sistem tenaga cadangan yang terdiri dari kombinasi baterai (biasanya baterai timbal-asam) dan generator cadangan berbahan bakar diesel untuk

listrik. Kegiatan operasi dan pemeliharaan juga dapat menghasilkan limbah elektronik (misalnya baterai nikel-kadmium dan papan sirkuit tercetak dari komputer dan peralatan elektronik lainnya serta baterai daya cadangan). Pengoperasian generator cadangan dan kendaraan servis juga dapat menghasilkan ban bekas, oli bekas, dan filter bekas. Peralatan transformator berpotensi mengandung Polychlorinated Biphenyls (PCB) sementara peralatan pendingin mungkin mengandung zat pendingin (potensiil Ozone Depleting Substances [ODS]).

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Operasional Perusahaan yang berhubungan dengan pembangunan menara pada lokasi operasional bisnis Perusahaan memiliki risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Adapun, risiko-risiko K3 dapat terkait pada proses penggalian, konstruksi, ataupun perbaikan komponen-komponen sistem telekomunikasi. Risiko ini dapat berdampak pada pekerja maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, aspek K3 menjadi material yang penting untuk dikelola untuk mencapai keberlanjutan Perusahaan. Adapun saat ini, Mitratel telah berupaya mengimplementasikan Sistem Manajemen K3 di semua jajaran perusahaan dengan mematuhi perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Sistem Manajemen K3.

5. Ketenagakerjaan

Isu ketenagakerjaan juga menjadi salah satu aspek yang menjadi material keberlanjutan, seperti isu keberagaman, isu diskriminasi dan kesetaraan gender, isu hak asasi pekerja, isu pengembangan kapasitas sumber daya manusia, maupun peningkatan perekrutan tenaga kerja untuk komunitas rentan. Salah satu isu keberlanjutan terkait ketenagakerjaan dapat dilihat dari isu prioritas Pemerintah Indonesia yang diajukan dalam G20. Pemerintah Indonesia memiliki prioritas antara lain:

1. Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Dunia Kerja.
2. Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas.
3. Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan.
4. Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja.

Dalam menghadapi isu keberlanjutan tersebut, Mitratel telah menerapkan sistem ketenagakerjaan yang diselaraskan dengan Undang – Undang Pemerintah Indonesia. Adapun kedepannya Mitratel akan melakukan penguatan-penguatan atas isu – isu ketenagakerjaan.

Selain isu di atas, isu penting dari ketenagakerjaan lainnya adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi perempuan dan akses mereka terhadap posisi kepemimpinan terutama dalam pengambilan keputusan di dunia kerja tanpa adanya diskriminasi. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu tekanan global saat ini. Oleh karena itu, strategi penguatan atas isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi hal yang perlu dilakukan oleh Mitratel.

6. Pelanggan/Tenant/Customer

Pelanggan/Tenant/Customer adalah salah satu rantai nilai perusahaan sehingga menjaga dan mengelola kepentingan dan kebutuhan mereka menjadi material keberlanjutan. Sosialisasi strategi perusahaan, penanganan keluhan, dan inovasi pemenuhan kebutuhan pelanggan/tenant/customer adalah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Perusahaan dalam menjaga keberlanjutan Perusahaan. Kepuasan akan pelayanan juga menjadi penting untuk diukur untuk mengukur kinerja dan inisiatif yang dilakukan perusahaan.

Selain itu, bisnis Mitratel yang sifatnya adalah jasa penyewaan infrastruktur telekomunikasi menyebabkan beberapa tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola berada atau tergantung pada proses operasional pelanggan/tenant/customer. Oleh karena itu, aspek peningkatan komunikasi terkait LST, mendorong kinerja LST tenant, dan kerja sama dalam mencapai target LST dengan pihak pelanggan/tenant/customer menjadi hal yang material untuk dilakukan.

7. Keamanan dan Privasi Data Perusahaan

Keamanan dan privasi data Perusahaan dalam sektor bisnis telekomunikasi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Tumbuhnya kekhawatiran publik tentang privasi telah menyebabkan peningkatan pengawasan peraturan atas penggunaan, pengumpulan, dan penjualan data konsumen. Perusahaan yang gagal mengelola kinerja di bidang ini rentan terhadap penurunan pendapatan sebagai akibat dari hilangnya kepercayaan konsumen, serta dampak keuangan yang berasal dari eksposur hukum. Pencegahan, deteksi, dan remediasi ancaman keamanan data yang tidak memadai dapat memengaruhi akuisisi dan retensi pelanggan dan mengakibatkan penurunan pangsa pasar dan permintaan yang lebih rendah untuk produk perusahaan. Selain kerusakan reputasi dan pergantian pelanggan, pelanggaran data juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya, umumnya terkait dengan upaya perbaikan seperti penawaran perlindungan identitas dan pelatihan karyawan tentang perlindungan data.

Selain itu, sebagai penyedia infrastruktur penting, kemampuan perusahaan untuk mencegah serangan siber kemungkinan akan memengaruhi reputasi dan nilai perusahaan, dengan dampak jangka panjang pada pangsa pasar dan potensi pertumbuhan pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan yang dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko keamanan data secara tepat waktu kemungkinan akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melindungi pangsa pasar dan nilai merek sekaligus mengurangi paparan risiko terhadap serangan siber. Selain itu, standar dan peraturan keamanan data kemungkinan akan memengaruhi biaya operasional perusahaan melalui peningkatan biaya kepatuhan. Oleh karena itu, kebijakan dan inisiatif terkait keamanan dan privasi data perlu dikembangkan oleh Mitratel.

8. Infrastruktur

Mengingat pentingnya jaringan telekomunikasi secara sistemik, gangguan sistemik atau ekonomi dapat terjadi jika infrastruktur jaringan perusahaan jasa telekomunikasi tidak dapat diandalkan dan rentan terhadap risiko kelangsungan bisnis. Karena frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang terkait dengan perubahan iklim meningkat, perusahaan jasa telekomunikasi akan menghadapi ancaman fisik yang semakin besar terhadap infrastruktur jaringan, dengan potensi dampak sosial atau sistemik yang signifikan. Dengan tidak adanya infrastruktur yang tangguh dan andal, perusahaan dapat menghadapi kehilangan pendapatan terkait dengan pemadaman layanan dan pengeluaran modal yang tidak direncanakan untuk memperbaiki peralatan yang rusak. Oleh karena itu, identifikasi risiko fisik Perusahaan, pengelolaan aset, dan pengembangan teknologi dalam infrastruktur yang dibuat menjadi material keberlanjutan Perusahaan.

9. Aset dan Data Informasi

Sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi, pengelolaan aset dan data informasi Perusahaan memiliki kompleksitas tersendiri. Jumlah aset dan data informasi yang tidak sedikit serta cakupan pengelolaannya yang tersebar di lokasi operasional perusahaan yang terdapat di banyak wilayah adalah salah satu tantangan operasional Perusahaan. Tantangan tersebut khususnya dalam hal identifikasi, pemeliharaan, dan keamanannya. Kegagalan dalam pengelolaan aset dan data informasi, rentan terhadap ketidaksamaan informasi antar dokumen atau divisi sehingga berakibat pada kerugian dalam implementasi jasa layanan ke pelanggan dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan karena hilangnya kepercayaan tenant selaku penerima layanan. Perusahaan perlu menerapkan pengelolaan aset dan data informasi yang efektif dan efisien sehingga memungkinkan pelacakan status data dan informasi aset secara cepat dan akurat. Hal tersebut dapat meminimalkan risiko kerusakan dan kehilangan aset serta hilangnya data informasi yang penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, aspek manajemen aset dan data informasi menjadi material LST yang perlu dikelola guna mencapai keberlanjutan Perusahaan.

10. Etika bisnis

Indonesia diidentifikasi sebagai negara yang rentan terhadap aspek kecurangan, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal tersebut menjadikan bisnis di Indonesia memiliki risiko atas tindakan tersebut. Adanya risiko tersebut, menjadikan etika bisnis dan pengelolaan tata kelola Perusahaan di Indonesia menjadi perhatian indeks penilaian LST dan global. Selain itu, adanya pengaduan terkait isu negatif etika bisnis Perusahaan dapat berdampak pada reputasi Perusahaan. Oleh

karena itu, penerapan tata kelola yang baik, etika bisnis perusahaan, dan respon – respon atas tindakan pelanggaran menjadi material keberlanjutan untuk bisnis Perusahaan.

11. Tata Kelola

Komitmen Perusahaan dalam mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia penting diwujudkan dengan mengembangkan tata kelola manajemen yang baik dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, termasuk di dalamnya Perusahaan harus menerapkan prinsip usaha berkelanjutan. Dalam melaksanakan prinsip tersebut, Perusahaan penting untuk memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Perusahaan. Di sisi lain, Perusahaan juga perlu untuk memperkuat kebijakan dan prosedur terkait keberlanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan prinsip usaha berkelanjutan serta untuk terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi seluruh Insan Perusahaan terkait usaha-usaha keberlanjutan yang lebih luas.

12. Masyarakat/Komunitas

Adanya penempatan infrastruktur pada daerah – daerah pedalaman dengan tingkat pengetahuan yang rendah mengakibatkan adanya risiko terkait pencurian komponen infrastruktur oleh masyarakat, risiko isu konflik kepemilikan lahan, dan risiko infrastruktur pada area kawasan hutan. Hal – hal tersebut menjadi bagian dari risiko Mitratel dalam proses pengelolaan aspek LST Perusahaan. Selain itu, isu kesenjangan layanan komunikasi dan pemanfaatan sarana telekomunikasi tidak pada tempatnya oleh komunitas tertentu juga menjadi isu keberlanjutan sektor telekomunikasi. Oleh karena itu, inisiatif keberlanjutan terkait hal tersebut dapat mendukung proses pemerataan kebutuhan layanan komunikasi masyarakat dan komunikasi sehat di Indonesia. Pengelolaan aspek tersebut dapat dilakukan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara berkelanjutan.

F. Visi, Misi dan Core Values

Visi dan Misi Mitratel	Visi dan Misi Keberlanjutan
<p>Visi</p> <p>Menjadi #1 Digital InfraCo di pasar APAC (Asia-Pacific) yang sedang berkembang dengan menawarkan layanan terbaik di kelasnya yang berkelanjutan</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi #1 Digital InfraCo di pasar APAC (Asia-Pacific) yang sedang berkembang dengan menawarkan layanan terbaik di kelasnya yang berkelanjutan.</p>
<p>Misi</p> <p>Untuk mendukung pelanggan kami sebagai mitra strategis dengan memanfaatkan kemampuan digital baru untuk memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan dan menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa</p>	<p>Misi</p> <p>Untuk mendukung pelanggan kami sebagai mitra strategis dengan memanfaatkan kemampuan digital baru untuk memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan dan menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa</p>
<p>Nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensinergikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam menjalankan bisnis untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. 	

2. Mitratel berkomitmen terhadap isu sosial, baik terkait kesetaraan gender, keselamatan dan Kesehatan karyawan, peningkatan kompetensi karyawan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk program kerja tahunan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.
3. Mitratel menjaga tata kelola dengan berfokus pada tata kelola manajemen yang baik dan berkelanjutan di sisi internalnya dengan menerapkan prinsip pertanggungjawaban, akuntabilitas, kesetaraan, kemandirian dan transparansi untuk menjaga tingkat kepercayaan dari seluruh stakeholder terhadap perusahaan.

G. Tujuan dan Pilar Kebijakan Keberlanjutan

Tujuan adanya kebijakan keberlanjutan adalah:

1. Memberikan arahan bagi Mitratel dalam menjalankan inisiatif keberlanjutan dimana Mitratel beroperasi, atau di wilayah distribusi dan penjualan produk dan jasanya.
2. Memberikan landasan kebijakan bagi kegiatan usaha dan investasi yang sejalan dengan komitmen keberlanjutan Mitratel.
3. Menjadi referensi bagi Mitratel dalam berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan.
4. Melembagakan konsep, prinsip, dan standar keberlanjutan di Mitratel.
5. Mempromosikan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) untuk masa depan yang berkelanjutan dan Mitratel
6. Mengembangkan generasi selanjutnya & peremajaan budaya- desain struktur organisasi, peran dan mekanisme kolaborasi

Pilar keberlanjutan Mitratel disusun dengan mengacu pada pilar keberlanjutan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dengan disesuaikan dengan karakter bisnis Perusahaan. Maka, pilar keberlanjutan dari Mitratel diterjemahkan ke dalam 3 aspek sebagai berikut:

1. **Right Governance**
Melaksanakan dan meningkatkan sistem tata kelola Perusahaan, kualitas pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), dan etika bisnis Perusahaan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan inisiatif - inisiatif LST.
2. **Right Environmental Approach**
Menerapkan pengelolaan dampak lingkungan dari bisnis Perusahaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek biaya dan penambahan nilai.
3. **Right Communication**
Secara aktif meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan LST pada pemangku kepentingan.

H. Kebijakan Keberlanjutan

1. **Right Governance**
 - 1.1 Mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan pedoman kode etik yang relevan dan hukum yang berlaku dalam proses bisnis Perusahaan
 - 1.2 Mengintegrasikan pertimbangan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola, serta kepentingan pemangku kepentingan ke dalam keputusan bisnis Perusahaan
 - 1.3 Menerapkan standar tata kelola yang menekankan aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas, selaras dengan *core value* Perusahaan. Menjalankan operasional Perusahaan dengan integritas yang tinggi dan bertanggung jawab.
 - 1.4 Melakukan peninjauan dan pengelolaan terhadap risiko dan peluang keberlanjutan Perusahaan
 - 1.5 Mengelola, menerapkan, dan mengevaluasi sistem keamanan data dan informasi dan sistem pengelolaan aset Perusahaan
 - 1.6 Meningkatkan budaya keragaman, kesetaraan, dan non-diskriminatif di dalam aktivitas bisnis Perusahaan
 - 1.7 Menyediakan tempat kerja yang aman dan tanpa bahaya bagi seluruh karyawan dan pihak lain yang bekerja dalam wilayah operasional perusahaan.

- 1.8 Menyusun, menjalankan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan strategi, kebijakan, manual, prosedur, indikator, dan target terkait aspek LST.

2. *Right Environmental Approach*

- 2.1 Memantau, mengelola, dan mengurangi risiko serta dampak negatif aktivitas bisnis Perusahaan terhadap lingkungan, termasuk mengurangi emisi dan limbah yang dihasilkan dari operasional bisnis Perusahaan.
- 2.2 Mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, termasuk energi, air, dan material lainnya, sesuai dengan identifikasi dampak materi yang digunakan.
- 2.3 Memperhatikan dan melindungi ekosistem wilayah menara yang berada di kawasan kehutanan dan konservasi alam sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk keberadaan flora dan fauna.
- 2.4 Turut berkontribusi dalam pemenuhan target pemerintah Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca
- 2.5 Mendorong inovasi ilmiah dan teknologi pengembangan produk dan layanan Perusahaan untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari aktivitas bisnis Perusahaan dan menjadi lebih berkelanjutan dengan tetap memastikan kualitas dan keamanan produk dan layanan.
- 2.6 Mendorong penggunaan energi alternatif dan penggunaan material yang efisien dan ramah lingkungan.

3. *Right Communication*

- 3.1 Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.
- 3.2 Membangun dan membina hubungan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mitra kerja, tenant dan masyarakat lokal dalam rangka menjaga hubungan jangka panjang.
- 3.3 Mendorong rantai pasok dan rantai nilai untuk menerapkan tanggung jawab LST.
- 3.4 Mendorong rantai pasok dan rantai nilai untuk meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya lainnya.
- 3.5 Mendorong tenant dan rantai pasok untuk memperhatikan risiko dan peluang terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dalam berbagai kebijakan dan operasi bisnisnya.
- 3.6 Mempertimbangkan aspek LST dalam memilih dan mengevaluasi kinerja rantai pasok dan rantai nilai.
- 3.7 Menerapkan mekanisme tanggap darurat di seluruh lokasi operasional perusahaan.

J. Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan Keberlanjutan Mitratel dilaksanakan secara kolektif yang dipimpin langsung oleh Direktur Investasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang relevan. Berbagai penyesuaian dan tindak lanjut akan dilakukan guna memenuhi Kebijakan Keberlanjutan ini. Monitoring dan evaluasi atas penerapan Kebijakan Keberlanjutan ini akan dilakukan oleh Direksi Kinerja atas pelaksanaan Kebijakan Keberlanjutan ini dilaporkan langsung dalam bentuk Laporan Keberlanjutan bersamaan dengan Laporan Tahunan

Jakarta,

2022

Direktur Utama